
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 71, BD Kabupaten Gresik 2022 (71)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- ABSTRAK:**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 mengatur mengenai Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Pasal 56 Peraturan tersebut mewajibkan penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini diperlukan sebagai langkah implementasi untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.
 - UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 14 Tahun 2005;PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;PP Nomor 38 Tahun 2016;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 133 Tahun 2018;Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021;
 - Peraturan ini mengatur tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana atau tindak gratifikasi yang menyebabkan kerugian pada daerah. Terdapat prosedur yang harus diikuti, termasuk pelaporan, pemeriksaan, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan. Bupati memiliki peran penting dalam menyelesaikan kerugian daerah dengan melibatkan Inspektorat. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penghapusan piutang daerah, sanksi, dan rehabilitasi. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas dalam penanganan kasus kerugian daerah untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

- CATATAN:**
- Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022
 - Status Peraturan bupati gresik Berlaku